



**Balai Bahasa  
Provinsi Papua**

**2025**

# LAPORAN KEUANGAN PENUTUP LIKUIDASI SATKER

**Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa  
Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset  
dan Teknologi**



Laman Web Kami  
[balaibahasapapua.kemdikbud.go.id](http://balaibahasapapua.kemdikbud.go.id)



Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (**Balai Bahasa Provinsi Papua**) mengalami likuidasi sehingga perlu untuk menyusun Laporan Keuangan Penutup berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Penutup (**Balai Bahasa Provinsi Papua**), menginformasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah periode 1 Januari s.d tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp,- atau 0,00% dari estimasi pendapatan sebesar Rp,- sedangkan realisasi Belanja Negara adalah Rp,- atau 0,00% dari alokasi anggaran sebesar Rp,-.
2. Neraca menyajikan informasi tentang komposisi aset, kewajiban, dan ekuitas (**Balai Bahasa Provinsi Papua**) per 30 Juni 2025, dengan nilai Aset sebesar Rp0,- dan Kewajiban sebesar Rp0,- sehingga Ekuitas adalah sebesar Rp0,-.
3. Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Operasional sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp,-. Laporan Operasional mengalami defisit sebagai akibat penerapan akuntansi berbasis akrual dimana pagu anggaran tidak diakui sebagai pendapatan, sedangkan realisasi belanja diakui sebagai beban.
4. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp,-.

Jayapura, 30 Juni 2025

Pejabat Penanggungjawab Likuidasi  
(Balai Bahasa Provinsi Papua),



(Valentina Lovina Tanate, M.Hum.)  
NIP196906122003122001

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Grafik	viii
Pernyataan Tanggung Jawab	x
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	2
II. Neraca	3
III. Laporan Operasional	3
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	3
V. Catatan atas Laporan Keuangan	3
A. Penjelasan Umum	4
A.1. Dasar Hukum	4
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis	6
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	7
A.4. Basis Akuntansi	7
A.5. Dasar Pengukuran	8
A.6. Kebijakan Akuntansi	8
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	20
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	20
B.2. Belanja Negara	22
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	29
C.1. Aset Lancar	29
C.2. Aset Tetap	36
C.3. Properti Investasi	40
C.4. Piutang Jangka Panjang	41
C.5. Aset Lainnya	42
C.6. Kewajiban Jangka Pendek	44
C.7. Ekuitas	46
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	47
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	47
D.2. Pendapatan Badan Layanan Umum	49
D.3. Beban Pegawai	50
D.4. Beban Persediaan	51
D.5. Beban Barang dan Jasa	51
D.6. Beban Pemeliharaan	52
D.7. Beban Perjalanan Dinas	53

D.8. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	54
D.9. Beban Bantuan Sosial	54
D.10. Beban Penyusutan dan Amortisasi	55
D.11. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	56
D.12. Kegiatan Non Operasional	56
D.13. Pos Luar Biasa	59
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	60
E.1. Ekuitas Awal	60
E.2. Surplus/(Defisit) LO	61
E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	61
E.4. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	61
E.5. Transaksi Antar Entitas	63
E.6. Ekuitas Akhir	64

Lampiran

## DAFTAR LAMPIRAN

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Lampiran

Daftar Tabel

Daftar Grafik

Daftar Singkatan

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.4. Basis Akuntansi

A.5. Dasar Pengukuran

A.6. Kebijakan Akuntansi

B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

B.2. Belanja Negara

B.3. Catatan Penting Lainnya

C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.2. Aset Tetap

C.3. Properti Investasi

C.4. Piutang Jangka Panjang

C.5. Aset Lainnya

C.6. Kewajiban Jangka Pendek

C.7. Ekuitas

C.8. Catatan Penting Lainnya

D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

D.2. Pendapatan Badan Layanan Umum

D.3. Beban Pegawai

D.4. Beban Persediaan

D.5. Beban Barang dan Jasa

- D.6. Beban Pemeliharaan
- D.7. Beban Perjalanan Dinas
- D.8. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
- D.9. Beban Bantuan Sosial
- D.10. Beban Penyusutan dan Amortisasi
- D.11. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
- D.12. Kegiatan Non Operasional
- D.13. Pos Luar Biasa
- E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
  - E.1. Ekuitas Awal
  - E.2. Surplus/(Defisit) LO
  - E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
  - E.4. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
  - E.5. Transaksi Antar Entitas
  - E.6. Ekuitas Akhir

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran per 30 Juni 2025	1
Tabel Ringkasan Neraca Per 30 Juni 2025	2
Tabel Masa Manfaat	13
Tabel Rincian Masa Manfaat Aset Tetap	15
Tabel Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	17
Tabel Estimasi dan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Per Tanggal 30 Juni 2025	19
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Per (Tanggal 30 Juni 2025) dan 30-Juni-2024	19
Perbandingan Realisasi Pendapatan BLU Per Jenis Pendapatan Per (Tanggal 30 Juni 2025) dan 30-Juni-2024	20
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan BLU Per Jenis Pendapatan Per (Tanggal 30 Juni 2025)	20
Perbandingan Realisasi PNBPN Lainnya Per Jenis Pendapatan Per (Tanggal 30 Juni 2025) dan 30-Juni-2024	21
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNBPN Lainnya Per Jenis Pendapatan Per (Tanggal 30 Juni 2025)	21
Rincian Anggaran dan Realisasi Per Jenis Belanja (Tanggal 30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024	22
Perbandingan Realisasi Belanja Per Tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024	23
Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Pegawai Per tanggal 30 Juni 2025 dan 30-Juni-2024	24
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Per Tanggal 30 Juni 2025 dan 30-Juni-2024	24
Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Barang Per (Tanggal 30 Juni 2025) dan 30-Juni-2024	25
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Barang Per (Tanggal 30 Juni 2025) dan 30-Juni-2024	25
Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal	

Per (Tanggal 30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024	26
Perbandingan Pagu dan Realisasi Per Jenis Belanja Modal	
Per (Tanggal 30 Juni 2025) dan 30-Juni-2024	26
Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial	
Per (Tanggal 30 Juni 2025) dan 30-Juni-2024	27
Rincian Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial	
Per Tanggal 30 Juni 2025 dan 30-Juni-2024	27
Rincian Aset Lancar Per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024	28
Kas di Bendahara Pengeluaran	29
Kas di Bendahara Penerimaan	30
Kas Lainnya Setara Kas	30
Mutasi Persediaan per (30 Juni 2025)	34
Rincian Aset Tetap Per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024	35
Mutasi Peralatan dan Mesin per (30 Juni 2025)	36
Mutasi Gedung dan Bangunan per (30 Juni 2025)	37
Mutasi Aset Tetap Lainnya per per (30 Juni 2025)	38
Rincian Aset Lainnya Per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024	41
Rincian Jenis Kewajiban Jangka Pendek Per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024	43
Ringkasan Perbandingan Laporan Operasional Untuk	
Periode yang Berakhir per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024	46
Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	
(30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024	47
Rincian Pendapatan Badan Layanan Umum (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024	48
Rincian Beban Pegawai (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024	49
Rincian Beban Persediaan (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024	50
Rincian Beban Barang dan Jasa (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024	51
Rincian Beban Pemeliharaan (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024	52
Rincian Beban Perjalanan Dinas (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024	52
Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	
(30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024	53
Rincian Beban Bantuan Sosial (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024	54
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024	54
Rincian Beban Penyisihan PiutangTak Tertagih (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024	55

Rincian Kegiatan Non Operasional (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024	57
Rincian Pendapatan Pelepasan Aset (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024	57
Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024	58
Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024	59

## DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Laporan Realisasi Anggaran per 30 Juni 2025	2
Komposisi anggaran dan realisasi belanja (dalam jutaan rupiah) Periode (Tanggal 30 Juni 2025)	22



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR  
DAN MENENGAH

**BALAI BAHASA  
PROVINSI PAPUA**

Jalan Yoka, Waena, Heram, Jayapura, Papua 99358  
Telepon (0967) 574154, 574171; Laman balaibahasapapua.kemdikbud.go.id

---

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Penutup ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Laporan Keuangan Penutup (**Balai Bahasa Provinsi Papua**) terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Penutup tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jayapura, 30 Juni 2025

Pejabat Penanggungjawab Likuidasi  
(Balai Bahasa Provinsi Papua),



(Valentina Lovina Tanate, M.Hum.)  
NIP.196906122003122001

## RINGKASAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, (**Balai Bahasa Provinsi Papua**) mengalami likuidasi sehingga perlu untuk menyusun Laporan Keuangan Penutup yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENUTUP

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran (pagu) dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 30 Juni 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp,- atau mencapai 0,00% dari estimasi pendapatan sebesar Rp,-.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp,- atau mencapai 0,00% dari alokasi anggaran sebesar Rp,-.

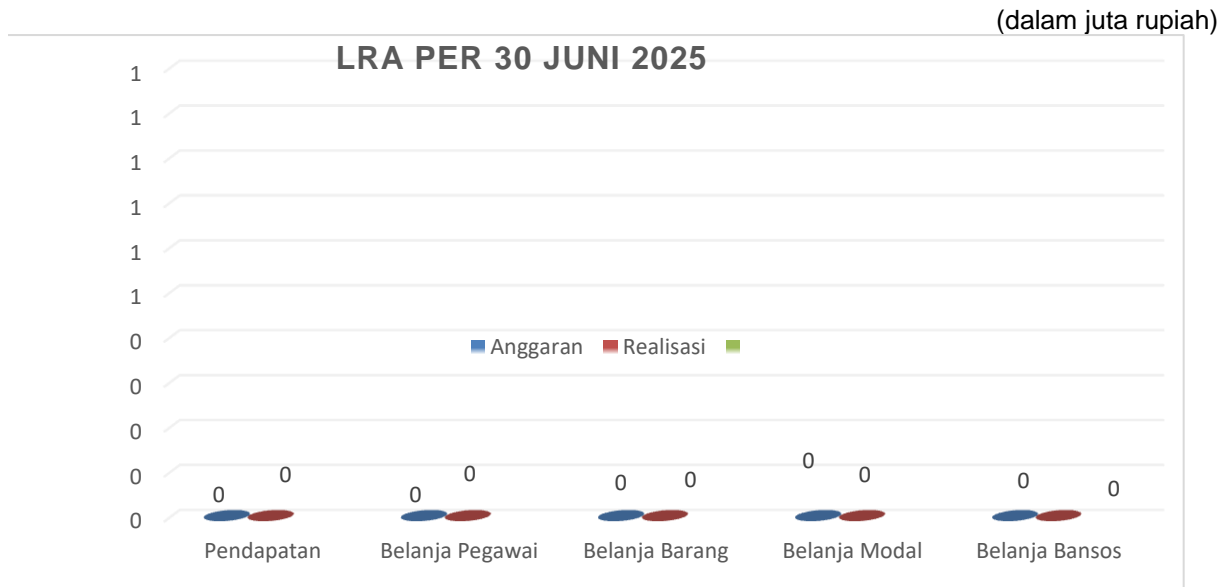
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran per 30 Juni 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1  
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran  
per 30 Juni 2025

(dalam rupiah)

Uraian	30 Juni 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Negara	-	-	0.00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>
Belanja Pegawai	-	-	0.00
Belanja Barang	-	-	0.00
Belanja Modal	-	-	0.00
Belanja Bantuan Sosial	-	-	0.00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

Laporan Realisasi Anggaran per 30 Juni 2025 disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Grafik 1 : Laporan Realisasi Anggaran per 30 Juni 2025

## 2. NERACA PENUTUP

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per **30 Juni 2025**, nilai Aset sebesar Rp0,- dan Kewajiban Rp0,- sehingga Ekuitas adalah sebesar Rp0,-

Ringkasan Neraca per **30 Juni 2025** dapat disajikan pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2  
Ringkasan Neraca  
Per **30 Juni 2025**

(dalam rupiah)

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Jumlah	%
<b>Aset</b>	-	8,361,761,701	-8,361,761,701	(100.00)
<b>Aset Lancar</b>	-	4,955,500	-4,955,500	(100.00)
<b>Aset Tetap</b>	-	8,356,806,201	-8,356,806,201	(100.00)
<b>Piutang Jangka Panjang</b>	-	-	-	0.00
<b>Aset Lainnya</b>	-	-	-	-
<b>Kewajiban</b>	-	-	-	-
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>	-	-	-	-
<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>	-	-	-	0.00
<b>Ekuitas</b>	-	8,361,761,701	-8,361,761,701	(100.00)
<b>Kewajiban dan Ekuitas</b>	-	8,361,761,701	-8,361,761,701	(100.00)

### **3. LAPORAN OPERASIONAL PENUTUP**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan operasional untuk periode sampai dengan **30 Juni 2025** adalah sebesar Rp,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp,- sehingga terdapat Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp,-. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp,- dan Pos Luar Biasa sebesar Rp0,- sehingga entitas mengalami Surplus/(Defisit)-LO sebesar Rp,-.

Defisit LO diakibatkan penerapan akuntansi berbasis akrual dimana pagu anggaran tidak diakui sebagai pendapatan Kementerian, sedangkan realisasi belanja diakui sebagai beban.

### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PENUTUP**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp,- dikurangi Surplus/(Defisit)-LO sebesar Rp,- kemudian ditambah koreksi yang menambah nilai ekuitas sebesar Rp,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp,-, sehingga Ekuitas (**Balai Bahasa Provinsi Papua**) pada tanggal **30 Juni 2025** adalah senilai Rp,- .

### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PENUTUP**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Penutup dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan akun-akun laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

## **V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

### **A. PENJELASAN UMUM**

#### *Dasar Hukum*

#### **A.1. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 Tentang Bagan Akun Standar;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017 Tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Pada Kementerian Negara/Lembaga;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.06/2017 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024;
20. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 27/M/2025 tentang Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan;
22. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 61/PB/2009 tentang Penyelesaian Kelebihan Pengembalian Uang Persediaan;
23. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-

331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar;

24. Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11033/A.A2/KU.03.02/2025 Tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Kemendikbudristek (BA 023).

*A.2. Profil dan Kebijakan Teknis (Nama Satker)*

## **A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS (Balai Bahasa Provinsi Papua)**

### **a. Struktur Organisasi Satker**

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Balai Bahasa dan Kantor Bahasa di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, susunan organisasi Balai Bahasa Provinsi Papua terdiri atas Kepala Balai, Kepala Subbagian Umum, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Berikut secara skematis susunan organisasi Balai Bahasa Provinsi Papua

*Visi (Nama Satker)*

### **b. Visi (Balai Bahasa Provinsi Papua)**

"mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global."

*Misi (Nama Satker)*

### **c. Misi (Balai Bahasa Provinsi Papua)**

1. Mewujudkan ekosistem pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra yang mendukung budaya riset dan inovasi kebahasaan yang kreatif.
2. Mewujudkan praktik-praktik pendidikan literasi di masyarakat

untuk meningkatkan budaya literasi yang tinggi yang ditopang oleh teknologi digital.

3. Mewujudkan penguatan diplomasi kebahasaan yang maju.
4. Mewujudkan perlindungan bahasa dan sastra yang dinamis berbasis kekuatan masyarakat.
5. Mewujudkan layanan profesional kebahasaan.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

### **A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Penutup per tanggal 30 Juni 2025 merupakan laporan keuangan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Bahasa Provinsi Papua. Laporan Keuangan Penutup ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

*Basis  
Akuntansi*

### **A.4. BASIS AKUNTANSI**

Balai Bahasa Provinsi Papua menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memerhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar  
Pengukuran

## **A.5. DASAR PENGUKURAN**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Bahasa Provinsi Papua dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan  
Akuntansi

## **A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Penutup Per 30 Juni 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-  
LRA

### **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas

bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-  
LO*

## **(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

## **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban*

**(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda diakui pada saat Lembaga/perorangan penerima bantuan pemerintah telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)/Berita Acara Serah Terima (BAST).
- Beban Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar (PIP) diakui pada saat siswa penerima bantuan sosial Program Indonesia Pintar melakukan aktivasi rekening virtual siswa tersebut.

*Aset*

**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar*

**Aset Lancar**

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum

diterima. Termasuk di dalam Belanja Dibayar Dimuka adalah Bantuan Pemerintah yang telah disalurkan kepada Pemda/Lembaga namun sampai dengan tanggal pelaporan Pemda/lembaga penerima belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau Berita Acara Serah Terima.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
  - Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Piutang Lainnya merupakan transaksi pengembalian belanja TAYL, dimana sampai dengan tanggal 31 Desember TAYL, kas tersebut masih berada di pihak ketiga dan belum dikembalikan ke kas negara atau Bendahara Pengeluaran.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh

dengan cara lainnya.

*Aset Tetap*

**Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap

hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan  
Aset Tetap*

### **Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik

Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Properti  
Investasi

### Properti Investasi

1. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
  - o Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
  - o dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Pada umumnya entitas pemerintah memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun, terdapat beberapa keadaan dimana entitas pemerintah memiliki aset properti yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau aset yang dimiliki dengan maksud untuk memperoleh kenaikan nilai.
3. Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai

oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).

4. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
  - Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
  - Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
5. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
6. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
7. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
8. Penyajian properti investasi:
  - Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
  - Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan

*Penyusutan  
Properti  
Investasi*

### **Penyusutan Properti Investasi**

1. Properti Investasi selain bentuk tanah disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan peraturan mengenai kebijakan penyusutan BMN. Metode penyusutan BMN Properti Investasi

dilakukan dengan mengikuti penyusutan BMN Klasifikasi Aset Tetap.

2. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
3. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Kepmenkeu Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut

Tabel  
Rincian Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang  
Jangka  
Panjang

### Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh

Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

#### *Aset Lainnya*

#### **Aset Lainnya**

- ✓ Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- ✓ Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ✓ Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- ✓ Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- ✓ Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- ✓ Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.
- ✓ Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

**(6) Kewajiban**

- ✓ Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- ✓ Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- ✓ Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi  
Pendapatan Negara  
dan Hibah Rp,-

### B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Sampai dengan Laporan Keuangan Likuidasi per (Tanggal 30 Juni 2025) adalah sebesar Rp,- atau mencapai 0,00% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp,-.

Tabel B.1  
Estimasi dan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah  
Per (Tanggal 30 Juni 2025)

(dalam rupiah)

No	Uraian	Estimasi PNBPA 2025	Realisasi s.d (30 Juni 2025)	%
1	Pendapatan PNBPA Lainnya	Rp -	Rp -	∞
<b>Jumlah</b>		<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>∞</b>

Perbandingan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Per (Tanggal 30 Juni 2025) dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel B.2  
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah  
Per (Tanggal 30 Juni 2025) dan 30-Juni-2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	30-Juni-2025	30-Juni-2024	Naik / (Turun)	% Naik/ (Turun)
1	Pendapatan PNBPA Lainnya	0	8,767,000	(8,767,000)	(100.00)
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>8,767,000</b>	<b>(8,767,000)</b>	<b>(100.00)</b>

Realisasi  
Pendapatan BLU  
Rp,-

### B.1.1 Pendapatan BLU

Realisasi pendapatan BLU (Balai Bahasa Provinsi Papua) sampai dengan Laporan Keuangan Penutup per (Tanggal 30 Juni 2025) adalah sebesar Rp,- atau mencapai 0,00% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp,-. Rincian Perbandingan Realisasi per jenis Pendapatan BLU per (Tanggal 30 Juni 2025) dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel B.3  
Perbandingan Realisasi Pendapatan BLU  
Per Jenis Pendapatan Per (Tanggal 30 Juni 2025) dan 30-Juni-2024

(dalam rupiah)

NO	KODE	URAIAN	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Kenaikan / (Penurunan)	
					Jumlah (Rp)	%
1	4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum			-	∞
2	4242	Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum			-	∞
3	4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU			-	∞
4	4244	Pendapatan Dari Alokasi APBN			-	∞
5	4249	Pendapatan BLU Lainnya			-	∞
<b>Jumlah</b>			-	-	-	∞

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan BLU per jenis pendapatan sampai dengan tanggal pelaporan tersaji pada Tabel berikut ini:

Tabel B.4  
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan BLU  
Per Jenis Pendapatan Per (Tanggal 30 Juni 2025)

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN	%
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum			∞
4242	Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum			∞
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU			∞
4244	Pendapatan Dari Alokasi APBN			∞
4249	Pendapatan BLU Lainnya			∞
<b>Jumlah</b>		-	-	∞

Realisasi Penerimaan BLU sampai dengan Laporan Keuangan Penutup Per (tanggal 30 Juni 2025) tidak terjadi kenaikan/(penurunan) pendapatan sebesar Rp,- atau 0,00% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2024.

Realisasi  
Pendapatan PNB  
Lainnya  
Rp,-

### B.1.2 Pendapatan PNB Lainnya

Realisasi pendapatan PNB lainnya (Balai Bahasa Provinsi Papua) sampai dengan Laporan Keuangan Penutup per (Tanggal 30 Juni 2025) adalah sebesar Rp,- atau mencapai 0,00% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp,-. Rincian Perbandingan Realisasi per jenis PNB Lainnya per (Tanggal 30 Juni 2025) dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel B.5  
Perbandingan Realisasi PNBP Lainnya  
Per Jenis Pendapatan Per (Tanggal 30 Juni 2025) dan 30-Juni-2024

(dalam rupiah)

Akun	URAIAN	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Kenaikan / (Penurunan)	
				Jumlah (Rp)	%
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	-	-	-	∞
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	-	-	-	∞
4256	Pendapatan Jasa Lainnya	-	-	-	∞
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	-	-	-	∞
4258	Pendapatan Denda	-	-	-	∞
4259	Pendapatan Lain-Lain	-	8,767,000	(8,767,000)	(100.00)
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>8,767,000</b>	<b>(8,767,000)</b>	<b>(100.00)</b>

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP lainnya per jenis pendapatan sampai dengan tanggal pelaporan tersaji pada Tabel berikut ini:

Tabel B.6  
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya  
Per Jenis Pendapatan Per (Tanggal 30 Juni 2025)

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN	%
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	-	-	∞
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	-	-	∞
4256	Pendapatan Jasa Lainnya	-	-	∞
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	-	-	∞
4258	Pendapatan Denda	-	-	∞
4259	Pendapatan Lain-Lain	-	-	∞
<b>JUMLAH</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>∞</b>

Realisasi Penerimaan Bukan Pajak Lainnya sampai dengan Laporan Keuangan Likuidasi Per (tanggal 30 Juni 2025) terjadi kenaikan/(penurunan) pendapatan sebesar Rp,- atau 0,00% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2024. Hal ini disebabkan karena pendapatan TA 2025 (Balai Bahasa Provinsi Papua) tidak menganggarkan target PNBP.

Realisasi Belanja  
Rp,-

## B.2. Belanja Negara

Realisasi belanja (Balai Bahasa Provinsi Papua) sampai dengan Laporan Keuangan Penutup per (Tanggal 30 Juni 2025) adalah sebesar Rp,- atau sebesar 0,00% dari anggarannya sebesar Rp,-.

Rincian anggaran dan realisasi per jenis belanja dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

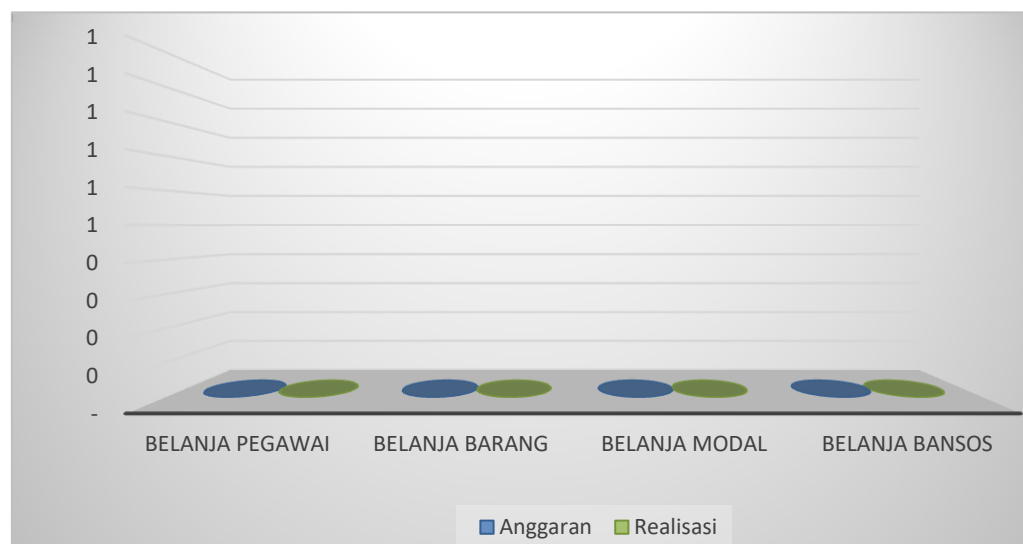
Tabel B.2.1  
Rincian Anggaran dan Realisasi Per Jenis Belanja  
(Tanggal 30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	30 Juni 2025			30 Juni 2024		
		Anggaran	Realisasi Belanja	%	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	0	0	∞	2,337,278,000	1,195,604,226	51.15
52	Belanja Barang	0	0	∞	10,842,951,000	5,624,098,723	51.87
53	Belanja Modal	0	0	∞	0	0	∞
57	Belanja Bansos	0	0	∞	0	0	∞
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>∞</b>	<b>13,180,229,000</b>	<b>6,819,702,949</b>	<b>51.74</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam Grafik B.2 berikut ini.

Grafik B.2  
Komposisi anggaran dan realisasi belanja (dalam jutaan rupiah)  
Periode (Tanggal 30 Juni 2025)



Tabel B.2.2  
Perbandingan Realisasi Belanja  
Per Tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Realisasi Belanja (Rp)		Naik/(Turun)	
		30 Juni 2025	30 Juni 2024	Jumlah (Rp.)	%
51	Belanja Pegawai	0	1,195,604,226	(1,195,604,226)	(100.00)
52	Belanja Barang	0	5,624,098,723	(5,624,098,723)	(100.00)
53	Belanja Modal	0	0	0	∞
57	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	∞
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>6,819,702,949</b>	<b>(6,819,702,949)</b>	<b>(100.00)</b>

Realisasi belanja per (Tanggal 30 Juni 2025) yaitu sebesar Rp,- atau 0,00% dari pagu anggaran sebesar Rp,-, sedangkan realisasi per 30-Juni-2024 sebesar Rp,6.819.702.949 atau 51,74% dari pagu anggaran sebesar Rp, 13,180,229,000, Dibandingkan periode sebelumnya terjadi kenaikan/(penurunan) prosentase realisasi belanja sebesar -100,00%. Hal ini disebabkan karena pendapatan TA 2025 (Balai Bahasa Provinsi Papua) telah melakukan Likuidasi Satker.

Belanja Pegawai  
Rp,-

### B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai sampai dengan Laporan Keuangan Penutup per (Tanggal 30 Juni 2025) dan 30-Juni-2024 adalah masing-masing sebesar Rp,- atau 0,00% dari pagu Rp,- dan Rp, 1,195,604,226 atau 51.15% dari pagu Rp, 2,337,278,000 Terjadi penurunan realisasi belanja pegawai dibandingkan 30-Juni-2025, yang disebabkan karena adanya Likuidasi Satker.

Tabel B.2.3  
Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Pegawai  
Per tanggal 30 Juni 2025 dan 30-Juni-2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik/(Turun) (Rp.)	%
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	-	1,188,789,258	(1,188,789,258)	(100.00)
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	-	-	-	∞
5121	Belanja Honorarium	-	-	-	∞
5122	Belanja Lembur	-	6,816,000	(6,816,000)	(100.00)
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transit	-	-	-	∞
	<b>Realisasi Belanja Bruto</b>	<b>-</b>	<b>1,195,605,258</b>	<b>(1,195,605,258)</b>	<b>(100.00)</b>
	Pengembalian Belanja Pegawai	-	1,032	(1,032)	(100.00)
	<b>Realisasi Belanja Neto</b>	<b>-</b>	<b>1,195,606,290</b>	<b>(1,195,606,290)</b>	<b>(100.00)</b>

Selanjutnya rincian perbandingan pagu dan realisasi belanja pegawai per Tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel B.2.4  
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai  
Per Tanggal 30 Juni 2025 dan 30-Juni-2024

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	30 Juni 2025			30 Juni 2024		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	-	-	∞	-	1,188,789,258	∞
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	-	-	∞	-	-	∞
5121	Belanja Honorarium	-	-	∞	-	-	∞
5122	Belanja Lembur	-	-	∞	-	6,816,000	∞
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transit	-	-	∞	-	-	∞
	Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	∞	-	1,032	∞
	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>∞</b>	<b>-</b>	<b>1,195,606,290</b>	<b>∞</b>

Belanja Barang  
Rp,-

## B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per (Tanggal 30 Juni 2025) dan 30-Juni-2024 adalah masing-masing sebesar Rp,- atau 0,00% dari pagu sebesar Rp,- dan Rp, 5,624,098,723 atau 51.87% dari pagu sebesar Rp, 10,842,951,000. Terjadi (penurunan) realisasi Belanja Barang dibandingkan Tah un Anggaran yang lalu sebesar Rp, 5,624,098,723 atau 51.87%, yang disebabkan karena adanya Likuidasi Satker

Perbandingan Rincian Belanja Barang (Tanggal 30 Juni 2025)

dan 30-Juni-2024, disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel B.2.5  
Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Barang  
Per (Tanggal 30 Juni 2025) dan 30-Juni-2024

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik/ (Turun)	%
5211	Belanja Barang Operasional	0	4,168,668	(4,168,668)	(100.00)
5212	Belanja Barang Non Operasional	-	906,820,149	(906,820,149)	(100.00)
5218	Belanja Barang Persediaan	-	-	-	∞
5221	Belanja Jasa	-	283,891,500	(283,891,500)	(100.00)
5231	Belanja Pemeliharaan	-	82,819,288	(82,819,288)	(100.00)
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	-	4,346,399,118	(4,346,399,118)	(100.00)
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-	∞
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	-	-	-	∞
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	-	-	-	∞
<b>Realisasi Belanja Bruto</b>		-	<b>5,624,098,723</b>	<b>(5,624,098,723)</b>	(100.00)
Pengembalian Belanja Barang		-	-	-	∞
<b>Realisasi Belanja Neto</b>		-	<b>5,624,098,723</b>	<b>(5,624,098,723)</b>	(100.00)

Adapun perbandingan realisasi Belanja Barang per (Tanggal 30 Juni 2025) dan 30-Juni-2024 dalam tabel berikut ini:

Tabel B.2.6  
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Barang  
Per (Tanggal 30 Juni 2025) dan 30-Juni-2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	30 Juni 2025			30 Juni 2024		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
5211	Belanja Barang Operasional	-	-	∞	-	-	∞
5212	Belanja Barang Non Operasional	-	-	∞	-	-	∞
5218	Belanja Barang Persediaan	-	-	∞	-	-	∞
5221	Belanja Jasa	-	-	∞	-	-	∞
5231	Belanja Pemeliharaan	-	-	∞	-	-	∞
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	-	-	∞	-	-	∞
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	∞	-	-	∞
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	-	-	∞	-	-	∞
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	-	-	∞	-	-	∞
Pengembalian Belanja Barang		-	-	∞	-	-	∞
<b>Jumlah</b>		-	-	∞	-	-	∞

Belanja Modal  
Rp,-

### B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per (Tanggal 30 Juni 2025) dan 30-Juni-2024 adalah masing-masing sebesar Rp,- atau 0,00% dari pagu sebesar Rp,- dan Rp,- atau 0,00% dari pagu sebesar Rp,-.

Perbandingan rincian realisasi Belanja Modal per (Tanggal 30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel B.2.7  
Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal  
Per (Tanggal 30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik/ (Turun) (Rp.)	%
531	Belanja Modal Tanah	-	-	-	∞
532	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	∞
533	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	∞
534	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	∞
536	Belanja Modal Lainnya	-	-	-	∞
<b>Realisasi Belanja Bruto</b>		-	-	-	∞
Pengembalian Belanja Modal		-	-	-	∞
<b>Realisasi Belanja Neto</b>		-	-	-	∞

Selanjutnya di bawah ini disajikan perbandingan pagu dan realisasi per jenis Belanja Modal Tanggal 30 Juni 2025 dan 30-Juni-2024 dalam Tabel berikut ini:

Tabel B.2.8  
Perbandingan Pagu dan Realisasi Per Jenis Belanja Modal  
Per (Tanggal 30 Juni 2025) dan 30-Juni-2024

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	30 Juni 2025			30 Juni 2024		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
531	Belanja Modal Tanah	-	-	∞	-	-	∞
532	Belanja Modal Peralatan	-	-	∞	-	-	∞
533	Belanja Modal Gedung	-	-	∞	-	-	∞
534	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	∞	-	-	∞
536	Belanja Modal Lainnya	-	-	∞	-	-	∞
Pengembalian Belanja Modal		-	-	∞	-	-	∞
<b>Jumlah</b>		-	-	∞	-	-	∞

Belanja Bantuan  
Sosial Rp,-

#### B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Neto Belanja Bantuan Sosial per (Tanggal 30 Juni 2025) dan 30-Juni-2024 adalah masing-masing sebesar Rp,- atau 0,00% dari pagu sebesar Rp,- dan Rp,- atau 0,00% dari pagu sebesar Rp,-.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial per (Tanggal 30 Juni 2025) dan 30-Juni-2024 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel B.2.9  
Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial  
Per (Tanggal 30 Juni 2025) dan 30-Juni-2024

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik/(Turun)	%
5711	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-	∞
5721	Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	-	-	-	∞
5731	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-	∞
5751	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	-	-	-	∞
5761	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	-	-	-	∞
<b>Jumlah Belanja Bruto</b>		-	-	-	∞
Pengembalian Belanja		-	-	-	∞
<b>Jumlah Belanja Neto</b>		-	-	-	∞

Adapun rincian perbandingan pagu dan realisasi Belanja Bantuan Sosial per Tanggal 30 Juni 2025 dan 30-Juni-2024 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel B.2.10  
Rincian Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial  
Per Tanggal 30 Juni 2025 dan 30-Juni-2024

(dalam rupiah)

Uraian	30 Juni 2025			30 Juni 2024		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	∞	-	-	∞
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	-	-	∞	-	-	∞
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	∞	-	-	∞
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	-	-	∞	-	-	∞
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	-	-	∞	-	-	∞
<b>Jumlah Belanja Bruto</b>	-	-	∞	-	-	∞
Pengembalian Belanja	-	-	∞	-	-	∞
<b>Jumlah Belanja Neto</b>	-	-	∞	-	-	∞

## C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

### Aset Lancar C.1. Aset Lancar Rp,00

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Nilai Aset Lancar per (30 Juni 2025 yg ditetapkan oleh penanggungjawab likuidasi) dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp,4,955,500. Dibandingkan 30 Juni 2024 terjadi penurunan sebesar (Rp,00) atau (100%).

Rincian Aset Lancar pada (Balai Bahasa Provinsi Papua) per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 tersaji pada tabel berikut:

Tabel C.1.1  
Rincian Aset Lancar  
Per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

No.	Aset Lancar	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	∞
2	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-	∞
3	Kas Lainnya dan Setara Kas	-	-	-	∞
4	Kas pada Badan Layanana Umum	-	-	-	∞
5	Investasi Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum	-	-	-	∞
6	Belanja Dibayar di Muka	-	-	-	∞
7	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	-	-	-	∞
8	Piutang Bukan Pajak (Neto)	-	-	-	∞
9	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Neto)	-	-	-	∞
10	Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Neto)	-	-	-	∞
11	Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Neto)	-	-	-	∞
12	Persediaan	-	4,955,500	- 4,955,500	(100.00)
	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>4,955,500</b>	<b>- 4,955,500</b>	<b>(100.00)</b>

Kas di Bendahara  
Pengeluaran Rp,00

### C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp,00. Atas saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024 tersebut telah ditindaklanjuti dengan rincian sebagai berikut:

#### Kas di Bendahara Pengeluaran

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	SALDO PER 30 Juni 2025	Penyaluran ke Pihak ke-3		Penyetoran Ke Kas Negara			SISA SALDO	Ket
				Tanggal Penyaluran	Nilai Penyaluran	NTPN	Tgl setor	Nilai Setor		
1	615122	Balai Bahasa Provinsi Papua	-	0	-	0	-	-	-	
2									-	
3									-	
4									-	
5									-	
JUMLAH			-		-			-	-	

Sehingga saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Laporan Keuangan Penutup adalah Rp0,00 (nihil).

Kas di Bendahara  
Penerimaan Rp,00

### C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp,00. Atas saldo kas di Bendahara Penerimaan tersebut telah disetorkan ke kas negara dengan rincian sebagai berikut:

Kas di Bendahara Penerimaan

NO	SETORAN		KODE SATKER	NAMA SATKER	SALDO PER 30 Juni 2025	PENYELESAIAN			
	Kode BA	Kode Es I				NTPN	TGL SETOR	NILAI	SALDO
1	023	013	615122	Balai Bahasa Prov.Papua	-				-
2									-
3									-
JUMLAH					-			-	-

Sehingga saldo kas di Bendahara Penerimaan pada Laporan Keuangan Penutup adalah Rp0,00 (nihil).

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp,00

**C.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas**

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp,00. Atas saldo Kas Lainnya Setara Kas tersebut disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Kas Lainnya Setara Kas

No	Kode Satker	Nama Satker	SALDO PER 30 JUNI 2025	Penyaluran ke Pihak ke-3		Penyelesaian Setelah Tgl Neraca			Saldo Yang Dilikuidasi	Saldo Lk Penutup
				Tanggal Penyaluran	Nilai Penyaluran	NTPN	Tgl setor	Nilai Setor		
1	615122	Balai Bahasa Prov.Papua	-		-			-	-	
2										
3										
JUMLAH			-		-		-	-	-	

Sehingga saldo Kas Lainnya dan Setara Kas pada Laporan Keuangan Penutup adalah Rp0,00 (nihil).

Kas pada Badan Layanan Umum Rp,00

**C.1.4 Kas pada BLU**

Kas pada Badan Layanan Umum merupakan saldo kas dan setara kas yang merupakan selisih antara pendapatan dan belanja yang telah dilakukan pengesahan yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi pengelola keuangan Badan Layanan Umum.

Saldo Kas pada BLU per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp,00.

*Investasi Jangka Pendek-  
BLU*

### **C.1.5 Investasi Jangka Pendek-BLU**

Investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum merupakan investasi dalam bentuk deposito dengan jangka waktu lebih dari tiga bulan sampai dengan 12 bulan sejak tanggal pelaporan serta surat berharga yang mudah diperjualbelikan.

Saldo Investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp,00.

*Belanja Dibayar di  
Muka  
Rp,00*

### **C.1.6 Belanja Dibayar di Muka**

Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima. Termasuk di dalam Belanja Dibayar Dimuka adalah Bantuan Pemerintah yang telah disalurkan kepada Pemda/Lembaga namun sampai dengan tanggal pelaporan Pemda/lembaga penerima belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau Berita Acara Serah Terima.

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp,00 dan Rp,00.

*Pendapatan yang  
Masih Harus Diterima  
Rp,00*

### **C.1.7 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum disampaikan tagihannya. Saldo per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah Rp,00 dan Rp,00.

*Piutang Bukan Pajak  
Rp,00*

### **C.1.8 Piutang Bukan Pajak**

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum

diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran.

Piutang Lainnya merupakan transaksi pengembalian belanja TAYL, dimana sampai dengan tanggal 30 Juni Tahun Anggaran Yang Lalu, kas tersebut masih berada di pihak ketiga dan belum dikembalikan ke kas negara atau Bendahara Pengeluaran.

Nilai Piutang Bukan Pajak per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp,00.

*Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak (Rp,00)*

#### **C.1.9 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak**

Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp,00) dan (Rp,00).

*Bagian Lancar TP/TGR Rp,00*

#### **C.1.10 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Nilai Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp,00.

*Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bag. Lancar TP/TGR (Rp,00)*

#### **C.1.11 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per (30 Juni 2025) sebesar (Rp,00) dan per 30 Juni 2024 adalah sebesar (Rp,00).

*Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Rp,00*

#### **C.1.12 Piutang dari Kegiatan Operasional BLU**

Piutang dari kegiatan Operasional BLU merupakan piutang yang timbul sebagai akibat dari hak tagih yang belum dilunasi, perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berasal dari transaksi bisnis karakteristik utama BLU seperti piutang SPP mahasiswa, piutang kerjasama pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Nilai Piutang dari kegiatan Operasional BLU per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp,00.

*Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Rp,00*

#### **C.1.13 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Operasional BLU**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Operasional BLU merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Operasional BLU yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp,00.

*Piutang dari Kegiatan Non-Operasional BLU Rp,00*

#### **C.1.14 Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU**

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU merupakan piutang yang timbul sebagai akibat dari hak tagih yang belum dilunasi, perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berasal dari transaksi bisnis selain karakteristik utama BLU, seperti piutang bunga dan piutang yang berasal dari sewa BMN. Nilai Piutang dari kegiatan Non Operasional BLU per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp,00.

*Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU Rp,00*

#### **C.1.15 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Non

Operasional BLU merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp,00.

Persediaan Rp,00

### C.1.16 Persediaan

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp,00 dan Rp,00.

Mutasi Persediaan per (30 Juni 2025) dapat dilihat pada tabel berikut:

<b>Saldo Per 30 Juni 2024</b>	<b>4.955.500</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	<b>4.955.500</b>
Reklasifikasi Masuk	
Pembelian	
Koreksi Nilai Tambah	
Persediaan Dalam Proses Masuk	
Perolehan Lainnya	
Reklasifikasi Dari Aset	
Batal Catat Persediaan Tak Dikuasai	
Hibah (Masuk)	
Transfer Masuk	
Koreksi Kuantitas Tambah	
Saldo Awal	4.955.500
Hibah Masuk BLU	
<b>Mutasi kurang:</b>	<b>4.955.500</b>
Keluar Lainnya	
Rusak	
Usang	
Transfer Keluar	4.955.500
Koreksi Nilai Kurang	
Hibah Keluar	
Hasil Opname Fisik	
Reklasifikasi ke Aset	
Catat Persediaan tak Dikuasai	
Persediaan Dalam Proses Keluar	
Habis Pakai	
Koreksi Kuantitas Kurang	
Reklasifikasi Keluar	
<b>Saldo Per (30 Juni 2025)</b>	<b>-</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2015	-
<b>Nilai Buku Per 30 Juni 2025</b>	<b>-</b>

Aset Tetap Rp,00

## C.2 Aset Tetap

Aset Tetap adalah merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Saldo Aset Tetap per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp,00 dan Rp,00.

Rincian Aset Tetap (Balai Bahasa Provinsi Papua) per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel C.2  
Rincian Aset Tetap  
Per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

No	Jenis	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Tanah	-	-	-	∞
2	Peralatan dan Mesin	-	4,479,301,460	(4,479,301,460)	- 100.00
3	Gedung dan Bangunan	-	8,911,867,000	(8,911,867,000)	- 100.00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	∞
5	Aset Tetap Lainnya	-	319,950,249	(319,950,249)	- 100.00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	∞
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>13,711,118,709</b>	<b>(13,711,118,709)</b>	<b>- 100.00</b>
Akumulasi Penyusutan		-	5,354,312,508	(5,354,312,508)	- 100.00
<b>Nilai Buku Aset Tetap</b>		<b>-</b>	<b>8,356,806,201</b>	<b>(8,356,806,201)</b>	<b>- 100.00</b>

Selanjutnya dibawah ini dijelaskan rincian per jenis Aset Tetap sebagai berikut:

Tanah Rp,00

### C.2.1 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki (Balai Bahasa Provinsi Papua) per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp,00.

Mutasi Tanah per (30 Juni 2025) dapat dilihat pada tabel berikut:

Peralatan dan Mesin  
Rp,00

### C.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp,00 dan sebesar Rp,4,479,301,460.

Mutasi Peralatan dan Mesin per (30 Juni 2025) dapat dilihat pada tabel berikut:

<b>Saldo Per 30 Juni 2024</b>	<b>4,479,301,460</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Reklasifikasi Masuk	
Perolehan Lainnya	
Transfer Masuk	
Hibah Masuk	
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	
Pengembangan Melalui KDP	
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	
Pembelian	
Saldo Awal	
<b>Mutasi kurang:</b>	<b>4,479,301,460</b>
Penghapusan	
Koreksi Susulan	
Koreksi Manual	
Penghentian Aset Dari Penggunaan	
Perubahan BMN Ke PI	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	
Koreksi Pencatatan	
Transfer Keluar	4,479,301,460
Hibah Keluar	
Reklasifikasi Keluar	
<b>Saldo Per (30 Juni 2025)</b>	<b>-</b>

*Gedung dan Bangunan  
Rp,00*

### **C.2.3 Gedung dan Bangunan**

Nilai Gedung dan Bangunan per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah Rp,00 dan Rp,8,911,867,000.

Mutasi Gedung dan Bangunan per (30 Juni 2025) dapat dilihat pada tabel berikut:

Mutasi Gedung dan Bangunan per (30 Juni 2025)

<b>Saldo Per 30 Juni 2024</b>	<b>8,911,867,000</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Reklasifikasi Masuk	
Perolehan Lainnya	
Transfer Masuk	
Hibah Masuk	
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	
Pengembangan Melalui KDP	
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	
Pembelian	
Saldo Awal	
<b>Mutasi kurang:</b>	<b>8,911,867,000</b>
Penghapusan	
Koreksi Susulan	
Koreksi Manual	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	
Perubahan BMN Ke PI	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	
Koreksi Pencatatan	
Transfer Keluar	8,911,867,000
Hibah Keluar	
Reklasifikasi Keluar	
<b>Saldo Per (30 Juni 2025)</b>	<b>-</b>

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp,00

#### C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp,00.

Aset Tetap Lainnya  
Rp,00

### C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan antara lain aset tetap renovasi dan aset tetap lainnya. Saldo Aset Tetap Lainnya per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp,00 dan Rp,319,950,249.

Mutasi Aset Tetap Lainnya per per (30 Juni 2025) dapat dilihat pada tabel berikut:

<b>Saldo Per 30 Juni 2024</b>	<b>319,950,249</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	<b>-</b>
Reklasifikasi Masuk	
Perolehan Lainnya	
Transfer Masuk	
Hibah Masuk	
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	
Pengembangan Melalui KDP	
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	
Pembelian	
Saldo Awal	
<b>Mutasi kurang:</b>	<b>319,950,249</b>
Penghapusan	
Koreksi Susulan	
Koreksi Manual	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	
Perubahan BMN Ke PI	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	
Koreksi Pencatatan	
Transfer Keluar	319,950,249
Hibah Keluar	
Reklasifikasi Keluar	
<b>Saldo Per (30 Juni 2025)</b>	<b>-</b>

Konstruksi dalam  
Pengerjaan Rp,00

### C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp,00 dan sebesar Rp,00.

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per (30 Juni 2025) dapat dilihat pada tabel berikut:

Akumulasi Penyusutan  
Aset Tetap  
(Rp -)

### C.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing (Rp,00) dan (Rp,00).

Properti Investasi (Rp  
-)

### C.3 Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif; atau
- b. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Properti Investasi per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing Rp,00 dan Rp,00.

Piutang Jangka Panjang Rp,00

## C. 4 Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang Jangka Panjang pada Kemendikbud terkait dengan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), dan Piutang Jangka Panjang Lainnya. Nilai Piutang Jangka Panjang (Neto) per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp,00. Selanjutnya dibawah ini dijelaskan rincian per jenis Piutang Jangka Panjang sebagai berikut:

Piutang Tagihan TP/TGR Rp,00

### C.4.1 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan tagihan yang belum dibayarkan dan merupakan hasil reklasifikasi dari Tagihan Ganti Rugi.

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp,00. Sehingga Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pada Laporan Keuangan Penutup adalah Rp0,- (nihil).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR Rp,00

### C.4.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp,00.

Piutang Tagihan TP/TGR BLU Rp,00

### C.4.3 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) BLU

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan

oleh bendahara/pegawai tersebut atas kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya pada satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU).

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) BLU per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp,00.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR BLU  
Rp,00

#### C.4.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) BLU

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tagihan - Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp,00.

Aset Lainnya  
Rp,00

#### C.5 Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah Rp,00 dan Rp,00 yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Rincian Nilai Aset Lainnya per (30 Juni 2025) tersaji pada tabel berikut:

Tabel C.5  
Rincian Aset Lainnya  
Per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Kenaikan/P enurunan	%
1	Aset Tak Berwujud				
2	Dana Yang dibatasi penggunaannya				
3	Aset Lain-lain				
	Jumlah				
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya/Amortisasi		(5,354,312,508)		
	Aset Lainnya				

Selanjutnya dijelaskan per jenis Aset Lainnya sebagai berikut:

Aset Tak Berwujud  
Rp,00

##### C.5.1 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada (Balai Bahasa Provinsi Papua) berupa software, hak cipta, dan lisensi yang

digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah Rp,00 dan Rp,00.

*Dana yang Dibatasi  
Penggunaannya Rp,00*

### **C.5.2 Dana yang Dibatasi Penggunaannya**

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun pihak di luar pemerintah.

Nilai Dana yang Dibatasi Penggunaannya (Balai Bahasa Provinsi Papua) per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp,00 dan sebesar Rp,00.

*Aset Lain-lain Rp,00*

### **C.5.3 Aset Lain-Lain**

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Nilai Aset Lain-lain per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp,00 dan sebesar Rp,00.

*Akumulasi Penyusutan/  
Amortisasi Aset  
Lainnya  
(Rp,00)*

### **C.5.4 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya**

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp,00) dan sebesar (Rp,5,354,312,508).

## KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek Rp,00

### C.6 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp,00. Rincian Kewajiban Jangka Pendek tersaji pada tabel berikut.

Tabel C.6.1  
Rincian Jenis Kewajiban Jangka Pendek  
Per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

No.	Kewajiban Jangka Pendek	30 Juni 2025	30 Juni 2025	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	∞
2	Hibah Yang Belum Disahkan	-	-	-	∞
3	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	∞
4	Uang Muka dari KPPN	-	-	-	∞
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	∞
	<b>Jumlah</b>	-	-	-	∞

Selanjutnya dijelaskan masing-masing jenis Kewajiban Jangka Pendek sebagai berikut:

Utang kepada Pihak Ketiga Rp,00

#### C.6.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada pihak ketiga merupakan lawan akun dari kas lainnya dan setara kas dan perhitungan akrual antara lain berupa pengeluaran yang belum didistribusikan ke pihak ketiga, belanja pegawai yang masih harus dibayar, belanja barang yang masih harus dibayar, belanja bantuan sosial yang masih harus dibayar, dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp,00.

*Hibah langsung yang  
belum disahkan Rp,00*

### **C.6.2 Hibah Langsung yang Belum Disahkan**

Hibah langsung yang belum disahkan per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp,00 dan Rp,00.

*Pendapatan Diterima di  
Muka  
Rp,00*

### **C.6.3 Pendapatan Diterima di Muka**

Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan bukan pajak yang sudah diterima di rekening kas negara tetapi belum menjadi hak pemerintah sepenuhnya karena masih melekat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari kepada pihak ketiga atau adanya kelebihan pembayaran oleh pihak ketiga tetapi belum dikembalikan. Pendapatan ini dapat berupa kelebihan Pembayaran PNBP untuk masa melebihi tanggal pelaporan dan lain-lain.

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 sebesar Rp,00 dan Rp,00.

*Uang Muka dari KPPN  
Rp,00*

### **C.6.4 Uang Muka dari KPPN**

Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Saldo Uang Muka dari KPPN per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 masing-masing sebesar Rp,00 dan sebesar Rp,00.

*Utang Jangka Pendek  
Lainnya  
Rp,00*

### **C.6.5 Utang Jangka Pendek Lainnya**

Utang jangka pendek lainnya merupakan utang dengan jangka waktu kurang dari satu tahun yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Utang Kepada Pihak Ketiga, Pendapatan Diterima Dimuka, maupun Uang Muka dari KPPN. Utang jangka pendek lainnya yang terdapat pada satker antara lain utang pajak, belanja barang dan jasa yang belum dibayar.

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 masing-masing sebesar Rp,00 dan sebesar Rp,00.

*Ekuitas  
Rp,00*

### **C.7.EKUITAS**

Ekuitas per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pada Laporan Operasional Kemendikbudristek per (30 Juni 2025) memiliki Pendapatan Operasional sebesar Rp,00 yang merupakan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Beban Operasional sebesar Rp,00 sehingga surplus/defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp,00. Dari Kegiatan Non Operasional terdapat surplus/defisit sebesar Rp,00. Dengan demikian Laporan Operasional per (30 Juni 2025) surplus/defisit sebesar Rp,00.

Selanjutnya disajikan ringkasan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024.

Tabel D.1  
Ringkasan Perbandingan Laporan Operasional  
Untuk Periode yang Berakhir per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Kenaikan / Penurunan	
			(Rp)	(%)
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>				
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya			-	∞
Pendapatan Badan Layanan Umum			-	∞
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	-	-	-	∞
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>				
Beban Pegawai		1,341,274,897	(1,341,274,897)	(100.000)
Beban Persediaan		19,085,600	(19,085,600)	(100.000)
Beban Barang dan Jasa		1,172,637,317	(1,172,637,317)	(100.000)
Beban Pemeliharaan		82,819,288	(82,819,288)	(100.000)
Beban Perjalanan Dinas		4,557,949,118	(4,557,949,118)	(100.000)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda			-	∞
Beban Bantuan Sosial			-	∞
Beban Penyusutan dan Amortisasi		290,497,025	(290,497,025)	(100.000)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih			-	∞
Beban Lain-lain			-	∞
<b>JUMLAH BEBAN</b>	-	7,464,263,245	(7,464,263,245)	(100.000)
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	-	(7,464,263,245)	7,464,263,245	(100.000)
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
<b>Surplus/Defisit Pelepasan Aset</b>			-	∞
<b>Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>		8,767,000	(8,767,000)	(100.000)
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	-	8,767,000	(8,767,000)	(100.000)
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	-	(7,455,496,245)	7,455,496,245	(100.000)

Pendapatan  
PNBP Lainnya  
Rp,00

**D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya**

Jumlah Pendapatan Per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp,00 dan Rp,00. Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

per jenis pendapatan sebagaimana disajikan di bawah ini :

Tabel D.1.1  
Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya  
(30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Kenaikan / Penurunan	
				(Rp)	(%)
<b>4241</b>	<b>Pendapatan Jasa Layanan Umum</b>	-	-	-	∞
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-	-	∞
424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, dan Teknologi	-	-	-	∞
424114	Pendapatan Jasa Pencetakan	-	-	-	∞
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	-	-	-	∞
<b>4242</b>	<b>Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum</b>	-	-	-	∞
424212	Pendapatan Hibah Terkait Dalam Negeri- Lembaga/Badan Usaha-Uang	-	-	-	∞
424213	Pendapatan Hibah Terkait Dalam Negeri - Pemda - Uang	-	-	-	∞
424215	Pendapatan Hibah Terkait Luar Negeri - Lembaga/Badan Usaha - Uang	-	-	-	∞
424221	Pendapatan Hibah Tidak Terkait Dalam Negeri - Perorangan - Uang	-	-	-	∞
424223	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda - Uang	-	-	-	∞
424225	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan	-	-	-	∞
424231	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Barang/Jasa	-	-	-	∞
424232	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha-Barang/Jasa	-	-	-	∞
424233	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda - Barang / Jasa	-	-	-	∞
424241	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Barang / Jasa	-	-	-	∞
424242	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha bentuk Barang/Jasa	-	-	-	∞
424243	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda - Barang / Jasa	-	-	-	∞
424245	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Barang / Jasa	-	-	-	∞
<b>4243</b>	<b>Pendapatan Hasil Kerja sama BLU</b>	-	-	-	∞
424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	-	-	-	∞
424312	Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	-	-	-	∞
424313	Pendapatan Hasil Kerjasama Pemerintah Daerah	-	-	-	∞
<b>4244</b>	<b>Pendapatan dari Alokasi APBN</b>	-	-	-	∞
424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	-	-	-	∞
424422	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di Luar Kementerian Negara/Lembaga	-	-	-	∞
<b>4249</b>	<b>Pendapatan BLU Lainnya</b>	-	-	-	∞
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	-	-	-	∞
424913	Komisi, Potongan, dan/atau Bentuk Lain Sebagai Akibat dari Pengadaan Barang/Jasa oleh BLU	-	-	-	∞
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	-	-	-	∞
424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	-	-	-	∞
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	-	-	-	∞
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	-	-	-	∞
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	-	-	-	∞
424925	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya	-	-	-	∞
424929	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	-	-	-	∞
424933	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Peralatan dan Mesin BLU	-	-	-	∞
424934	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Aset Tetap Lainnya BLU	-	-	-	∞
424939	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN Lainnya BLU	-	-	-	∞
<b>4251</b>	<b>Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran</b>	-	-	-	∞
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	-	-	-	∞
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-	-	∞
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	-	-	-	∞
425133	Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	∞
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	-	-	-	∞
<b>4252</b>	<b>Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum</b>	-	-	-	∞
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	-	-	-	∞
<b>4254</b>	<b>Pendapatan Pendidikan, Budaya Riset Teknologi</b>	-	-	-	∞
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	-	-	-	∞
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	-	-	-	∞
425413	Pendapatan Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat	-	-	-	∞
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	-	-	-	∞
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	-	-	-	∞
425436	Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	-	-	-	∞
425459	Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan Lainnya	-	-	-	∞
<b>4256</b>	<b>Pendapatan Jasa Lainnya</b>	-	-	-	∞
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	-	-	-	∞
<b>4257</b>	<b>Pendapatan Bunga pengelolaan Rekening bank dan Pengelolaan Keuangan</b>	-	-	-	∞
425761	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan	-	-	-	∞
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	-	-	∞
<b>4258</b>	<b>Pendapatan Denda</b>	-	-	-	∞
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-	-	∞
425839	Pendapatan Denda Lainnya	-	-	-	∞
<b>4259</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	-	-	-	∞
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	-	-	∞
	<b>Jumlah</b>	-	-	-	∞

Pendapatan  
Badan Layanan  
Umum  
Rp,00

## D.2 Pendapatan Badan Layanan Umum

Jumlah Pendapatan Per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp,00 dan Rp,00. Rincian Pendapatan Badan Layanan Umum per jenis pendapatan sebagaimana disajikan di bawah ini :

Tabel D.2  
Rincian Pendapatan Badan Layanan Umum  
(30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Kenaikan / Penurunan	
				(Rp)	(%)
<b>4241</b>	<b>Pendapatan Jasa Layanan Umum</b>	-	-	-	∞
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan			-	∞
424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, dan Teknologi			-	∞
424114	Pendapatan Jasa Pencetakan			-	∞
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya			-	∞
<b>4242</b>	<b>Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum</b>	-	-	-	∞
424212	Pendapatan Hibah Terkait Dalam Negeri- Lembaga/Badan Usaha-Uang			-	∞
424213	Pendapatan Hibah Terkait Dalam Negeri - Pemda - Uang			-	∞
424215	Pendapatan Hibah Terkait Luar Negeri - Lembaga/Badan Usaha - Uang			-	∞
424221	Pendapatan Hibah Tidak Terkait Dalam Negeri - Perorangan - Uang			-	∞
424223	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda - Uang			-	∞
424231	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Barang/Jasa			-	∞
424232	Pendapatan Hibah Terkait Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha-Barang/Jasa			-	∞
424241	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Barang / Jasa			-	∞
424242	Pendapatan Hibah Tidak Terkait Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha bentuk Barang/Jasa			-	∞
424243	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda - Barang / Jasa			-	∞
<b>4243</b>	<b>Pendapatan Hasil Kerja sama BLU</b>	-	-	-	∞
424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan			-	∞
424312	Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha			-	∞
424313	Pendapatan Hasil Kerjasama Pemerintah Daerah			-	∞
<b>4244</b>	<b>Pendapatan dari Alokasi APBN</b>	-	-	-	∞
424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga			-	∞
424422	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di Luar Kementerian Negara/Lembaga			-	∞
<b>4249</b>	<b>Pendapatan BLU Lainnya</b>	-	-	-	∞
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU			-	∞
424913	Komisi, Potongan, dan/atau Bentuk Lain Sebagai Akibat dari Pengadaan Barang/Jasa oleh BLU			-	∞
424919	Pendapatan Lain-lain BLU			-	∞
424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah			-	∞
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung			-	∞
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan			-	∞
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin			-	∞
424925	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya			-	∞
424929	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya			-	∞
424933	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Peralatan dan Mesin BLU			-	∞
424939	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN Lainnya BLU			-	∞
<b>Jumlah</b>		-	-	-	∞

### D.3. Beban Pegawai

Beban Pegawai  
Rp,00

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Jumlah Beban Pegawai pada (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp,00 dan sebesar Rp, 1,341,274,897.

Rincian Beban Pegawai untuk (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pegawai  
(30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian Jenis Beban	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Kenaikan / Penurunan	
				(Rp)	(%)
<b>5111</b>	<b>Beban Gaji dan Tunjangan PNS</b>	-	-	-	∞
511111	Beban Gaji Pokok PNS		-	-	∞
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS		-	-	∞
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS		-	-	∞
511122	Beban Tunj. Anak PNS		-	-	∞
511123	Beban Tunj. Struktural PNS		-	-	∞
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS		-	-	∞
511125	Beban Tunj. PPh PNS		-	-	∞
511126	Beban Tunj. Beras PNS		-	-	∞
511129	Beban Uang Makan PNS		-	-	∞
511137	Beban Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa Pada PT untuk Mengikuti Pendidikan Pasca Sarjana PNS			-	∞
511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS		-	-	∞
511151	Beban Tunjangan Umum PNS		-	-	∞
511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen			-	∞
511154	Beban Tunjangan Kehormatan Profesor			-	∞
511188	Beban Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa Pada PT untuk Mengikuti Pendidikan Pasca Sarjana PNS			-	∞
<b>5113</b>	<b>Beban Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara</b>	-	-	-	∞
511323	Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara			-	∞
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara			-	∞
511337	Belanja Tunjangan Lain-lain Pejabat Negara			-	∞
<b>5115</b>	<b>Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS</b>	-	-	-	∞
511511	Beban Gaji Pokok Pegawai Non PNS			-	∞
511512	Beban Tunjangan Pegawai Non PNS			-	∞
511519	Beban Tunjangan Lainnya Non PNS			-	∞
511521	Beban Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS			-	∞
511529	Beban Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluh			-	∞
<b>5116</b>	<b>Beban Gaji dan Tunjangan PPPK</b>	-	-	-	∞
511611	Beban Gaji Pokok PPPK			-	∞
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK			-	∞
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK			-	∞
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK			-	∞
511623	Beban Tunjangan Struktural PPPK			-	∞
511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK			-	∞
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK			-	∞
511628	Beban Uang Makan PPPK			-	∞
511632	Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK			-	∞
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK			-	∞
<b>5122</b>	<b>Beban Lembur</b>	-	-	-	∞
512211	Beban Uang Lembur		-	-	∞
512212	Beban Uang Lembur PPPK			-	∞
<b>5124</b>	<b>Beban Tunj. Khusus &amp; Beban Pegawai Transito</b>	-	-	-	∞
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)			-	∞
512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK			-	∞
<b>5251</b>	<b>Beban Barang BLU</b>	-	-	-	∞
525111	Beban Gaji dan Tunjangan			-	∞
	<b>Jumlah</b>	-	-	-	∞

Beban  
Persediaan  
Rp,00

#### D.4. Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban Persediaan pada (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp,00.

Rincian Beban Persediaan (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel D.4  
Rincian Beban Persediaan  
(30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian Jenis Beban	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Kenaikan / Penurunan	
				(Rp)	(%)
593111	Beban Persediaan Konsumsi	-	-	-	∞
593131	Beban Persediaan bahan baku	-	-	-	∞
593149	Beban Persediaan Lainnya	-	-	-	∞
Jumlah		-	-	-	∞

Beban Barang  
dan Jasa  
Rp,00

#### D.5. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Jumlah Beban Barang dan Jasa Per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp,00.

Rincian Beban Barang dan Jasa per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel D.5  
Rincian Beban Barang dan Jasa  
(30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

Kode Akun	Uraian Jenis Beban	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Kenaikan / Penurunan	
				(Rp)	(%)
521111	Beban Keperluan Kantor			-	∞
521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan			-	∞
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh			-	∞
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			-	∞
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja			-	∞
521119	Beban Barang Operasional Lainnya			-	∞
521211	Beban Bahan			-	∞
521213	Beban Honor Output Kegiatan			-	∞
521216	Beban Pencairan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum			-	∞
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya			-	∞
521231	Beban Barang Persediaan Penghargaan dalam bentuk uang			-	∞
521232	Beban Barang Pemberian Beasiswa Non PNS dalam bentuk uang			-	∞
521233	Beban Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang			-	∞
521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel			-	∞
521253	Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel			-	∞
521254	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel			-	∞
522111	Beban Langganan Listrik			-	∞
522112	Beban Langganan Telepon			-	∞
522113	Beban Langganan Air			-	∞
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya			-	∞
522121	Beban Jasa Pos dan Giro			-	∞
522131	Beban Jasa Konsultan			-	∞
522141	Beban Sewa			-	∞
522142	Belanja Fasilitas Sewa Rumah untuk Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri			-	∞
522151	Beban Jasa Profesi			-	∞
522191	Beban Jasa Lainnya			-	∞
525112	Beban Barang			-	∞
525113	Beban Jasa			-	∞
525119	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			-	∞
525143	Beban Jasa BLU Kepada BLU Lainnya dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga			-	∞
525144	Beban Jasa BLU Kepada BLU Lain yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga Lain			-	∞
525162	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU			-	∞
525163	Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel BLU			-	∞
525164	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel BLU			-	∞
595112	Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin			-	∞
595115	Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya			-	∞
595122	Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin - BLU			-	∞
595123	Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan - BLU			-	∞
<b>Jumlah</b>		-	-	-	∞

Beban  
Pemeliharaan  
Rp,00

#### D.6. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Beban Pemeliharaan per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp,00.

Rincian beban pemeliharaan untuk per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan  
(30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian Jenis Beban	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Kenaikan / Penurunan	
				(Rp)	(%)
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			-	∞
523113	Beban Asuransi Gedung dan Bangunan			-	∞
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya			-	∞
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			-	∞
523122	Beban BBM dan Pelumas dan Pelumas Khusus Non Pertamina			-	∞
523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-	∞
523131	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			-	∞
523133	Beban Pemeliharaan Jaringan			-	∞
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya			-	∞
525114	Beban Pemeliharaan			-	∞
593113	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan			-	∞
593114	Beban Persediaan Suku Cadang			-	∞
595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan			-	∞
<b>JUMLAH</b>		-	-	-	∞

**D.7. Beban Perjalanan Dinas**

Beban  
Perjalanan  
Dinas Rp,00

Beban Perjalanan Dinas adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp,00.

Rincian Beban Perjalanan Dinas per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas  
(30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian Jenis Beban	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Kenaikan / Penurunan	
				(Rp)	(%)
524111	Beban Perjalanan Biasa			-	∞
524112	Beban Perjalanan Tetap			-	∞
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota			-	∞
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			-	∞
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			-	∞
524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri			-	∞
524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri			-	∞
525115	Beban Perjalanan			-	∞
<b>Jumlah</b>		-	-	-	∞

Beban Barang  
untuk  
Diserahkan  
kepada  
Masyarakat/Pe  
mda  
Rp,00

### D.8. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada lembaga/masyarakat/pemda dengan tujuan untuk meningkatkan mutu dan akses pendidikan di Bidang Pendidikan dan kebudayaan.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp,00.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda  
(30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian Jenis Beban	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Kenaikan / Penurunan	
				(Rp)	(%)
526122	Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda			-	∞
526123	Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Uang			-	∞
526312	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah			-	∞
593122	Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan Kepada Masyarakat			-	∞
593123	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan Kepada Masyarakat			-	∞
593124	Beban Persediaan Peralatan dan Mesin Untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat			-	∞
593125	Beban Persediaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Untuk diserahkan Kepada Masyarakat			-	∞
593126	Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya Untuk diserahkan Kepada Masyarakat			-	∞
593127	Beban Persediaan Aset Lain-lain untuk diserahkan Kepada Masyarakat			-	∞
593128	Beban Barang Persediaan Lainnya Untuk Dijual atau Diserahkan Ke Masyarakat			-	∞
<b>Jumlah</b>		-	-	-	∞

### D.9. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Beban Bantuan Sosial per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp,00.

Rincian Beban Bantuan Sosial per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Beban Bantuan  
Sosial Rp,00

Rincian Beban Bantuan Sosial  
(30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian Jenis Beban	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Kenaikan / Penurunan	
				(Rp)	(%)
572111	Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang			-	∞
573112	Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang			-	∞
576111	Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang			-	∞
<b>Jumlah</b>		-	-	-	∞

Beban  
Penyusutan  
dan Amortisasi  
Rp,00

#### D.10. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp,00.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
(30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian Jenis Beban	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Kenaikan / Penurunan	
				(Rp)	(%)
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin			-	∞
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan			-	∞
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan			-	∞
591312	Beban Penyusutan Irigasi			-	∞
591313	Beban Penyusutan Jaringan			-	∞
591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya			-	∞
<b>Jumlah Penyusutan</b>		-	-	-	∞
592112	Beban Amortisasi Hak Cipta			-	∞
592114	Beban Amortisasi Paten			-	∞
592115	Beban Amortisasi Software			-	∞
592116	Beban Amortisasi Lisensi			-	∞
592117	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya			-	∞
592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan			-	∞
592222	Beban Penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan			-	∞
<b>Jumlah Amortisasi</b>		-	-	-	∞
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>		-	-	-	∞

Beban  
Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih Rp,00

### D.11. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp,00.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 pada tabel berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih  
(30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian Jenis Beban	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Kenaikan / Penurunan	
				(Rp)	(%)
594211	Beban Penyisihan Piutang PNB			-	∞
594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya			-	∞
594421	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan			-	∞
594612	Beban Penyisihan Piutang BLU Pelayanan Pendidikan			-	∞
594619	Beban Penyisihan Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa			-	∞
594641	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU			-	∞
594711	Beban Penyisihan Piutang Sewa Tanah BLU			-	∞
594712	Beban Penyisihan Piutang Sewa Gedung BLU			-	∞
594713	Beban Penyisihan Piutang Sewa Ruang BLU			-	∞
594719	Beban Penyisihan Piutang Sewa Lainnya BLU			-	∞
594791	Beban Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional			-	∞
594941	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tunjangan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU			-	∞
<b>Jumlah</b>		-	-	-	∞

Surplus /Defisit  
dari Kegiatan  
Non  
Operasional  
Rp,00

### D.12. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp,00.

Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional  
(30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Kenaikan / Penurunan	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Pelepasan Aset	-	-	-	∞
Beban Pelepasan Aset	-	-	-	∞
<b>(Defisit) Pelepasan Aset</b>	-	-	-	∞
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-	∞
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-	∞
<b>Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	-	-	-	∞
<b>Surplus dari Kegiatan Non Operasional</b>	-	-	-	∞

Pendapatan  
Pelepasan Aset  
Rp,00

#### D.12.1. Pendapatan Pelepasan Aset

Pendapatan Pelepasan Aset merupakan pendapatan dari penjualan tanah, gedung dan bangunan yang timbul dari hasil penghapusan BMN yang telah dilakukan proses lelang. Pendapatan Pelepasan Aset per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp,00.

Rincian Pendapatan Pelepasan Aset per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel D.12.1  
Rincian Pendapatan Pelepasan Aset  
(30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Kenaikan / Penurunan	
				(Rp)	(%)
425121	Pendapatan dan Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan			-	∞
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin			-	∞
425124	Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan			-	∞
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya			-	∞
	<b>Jumlah</b>	-	-	-	∞

Beban  
Pelepasan Aset  
Rp,00

#### D.12.2. Beban Pelepasan Aset

Beban Pelepasan Aset merupakan beban yang timbul sebagai akibat dari reklasifikasi dari aset tetap ke aset lain-lain. Aset Tetap yang akan dihapuskan terlebih dahulu akan direklasifikasikan ke Aset Lain-lain sebelum akhirnya terbit

Surat Keputusan (SK) Penghapusan dari Pengguna Barang (Mendikbudristek) sebagai dasar penghapusan. Beban Pelepasan Aset per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp,00.

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp,00

### D.12.3. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan pendapatan yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp,00.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel D.12.3  
Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya  
(30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Kenaikan / Penurunan	
				(Rp)	(%)
424914	Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi - BLU			-	∞
424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu			-	∞
424917	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan / TGR - BLU			-	∞
425173	Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN			-	∞
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain			-	∞
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu			-	∞
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu			-	∞
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu			-	∞
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Lalu			-	∞
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS			-	∞
491111	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi			-	∞
491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya			-	∞
491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan			-	∞
Jumlah		-	-	-	∞

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp,00

### D.12.4. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp,00.

Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per (30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel D.12.4  
Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya  
(30 Juni 2025) dan 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Kenaikan / Penurunan	
				(Rp)	(%)
593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan			-	∞
596121	Beban Persediaan Rusak/Usang			-	∞
596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi			-	∞
Jumlah		-	-	-	∞

### D.13. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak ada saldo Pos Luar Biasa pada Laporan Keuangan Penutup ini.

Pos Luar Biasa  
Rp0,-

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah Ekuitas awal per 1 Januari 2025 sebesar Rp, 8,361,761,701 mengalami penurunan ekuitas sebesar Rp 8,361,761,701 sehingga jumlah ekuitas akhir per (30 Juni 2025) adalah sebesar Rp0,00.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel E.1  
Perbandingan Rincian Laporan Perubahan Ekuitas  
Untuk Periode Yang Berakhir per (30 Juni 2025) dan (30 Juni 2024)

(dalam rupiah)

Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik/(Turun)	%
Ekuitas Awal (A)	8,361,761,701	8,713,507,403	(351,745,702)	(4.04)
Surplus/Defisit - LO (1)	-	-7,455,496,245	7,455,496,245	(100.00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	-	-	-	∞
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas (2)	-	-	-	∞
Penyesuaian Nilai Aset	-	-	-	∞
Koreksi Nilai Persediaan	-	-	-	∞
Koreksi Atas Reklasifikasi	-	-	-	∞
Selisih Revaluasi Aset	-	-	-	∞
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	-	-	-	∞
Lain-lain	-	-	-	∞
Transaksi Antar Entitas (3)	(-8,361,761,701)	6,912,632,805	(15,274,394,506)	(220.96)
Kenaikan/Penurunan Ekuitas (B = 1 + 2 + 3)	(8,361,761,701)	(542,863,440)	(7,818,898,261)	1,440.31
Ekuitas Akhir (A + B)	-	8,170,643,963	(8,170,643,963)	(100.00)

Ekuitas akhir (Balai Bahasa Provinsi Papua) per (30 Juni 2025) Rp0,00 karena mengalami likuidasi (tidak memiliki DIPA tahun 2025) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Ekuitas Awal  
Rp,8.361.761.  
701

### E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp, 8,361,761,701 dan Rp, 8,713,507,403

Surplus/(Defisit)  
t) LO (Rp,00)

## E.2 Surplus/(Defisit) Laporan Operasional (LO)

Surplus/(Defisit) LO merupakan penjumlahan antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. LO (Balai Bahasa Provinsi Papua) mengalami defisit untuk periode yang berakhir pada (30 Juni 2025) dan (30 Juni 2024) masing-masing sebesar (Rp,00) dan (Rp, 7,455,496,245).

Dampak  
Kumulatif  
Perubahan  
Kebijakan  
Akuntansi/Kesalahan/Mendasar  
Rp,00

## E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar merupakan pengaruh kumulatif yang bersifat retrospektif terhadap laporan keuangan sebagai akibat dari suatu perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan ataupun berupa kesalahan perhitungan matematis. Kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi kesalahan interpretasi fakta, termasuk kecurangan (*fraud*) atau kelalaian.

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar per (30 Juni 2025) dan (30 Juni 2024).

Koreksi yang  
Menambah  
atau  
Mengurangi  
Ekuitas Rp,00

## E.4 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah atau Mengurangi Ekuitas per (30 Juni 2025) adalah sebesar Rp,00 sedangkan per (30 Juni 2024) sebesar Rp,00. Rincian detail Koreksi yang menambah atau mengurangi Ekuitas disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel E.4  
Koreksi yang Menambah atau Mengurangi Ekuitas  
Per (30 Juni 2025) dan (30 Juni 2024)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik/(Turun)	%
E.4.1	Penyesuaian Nilai Aset	-	-	-	∞
E.4.2	Koreksi Nilai Persediaan	-	-	-	∞
E.4.3	Koreksi Atas Reklasifikasi	-	-	-	∞
E.4.4	Selisih Revaluasi Aset	-	-	-	∞
E.4.5	Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	-	-	-	∞
E.4.6	Lain-Lain	-	-	-	∞
<b>Jumlah</b>		-	-	-	∞

Penyesuaian  
Nilai Aset  
Rp,00

#### E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir. Tidak terdapat saldo penyesuaian nilai aset per (30 Juni 2025) dan (30 Juni 2024).

Koreksi Nilai  
Persediaan  
Rp,00

#### E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan merupakan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian atau pencatatan persediaan yang terjadi pada periode per (30 Juni 2025). Koreksi nilai persediaan per (30 Juni 2025) dan (30 Juni 2024) adalah sebesar Rp,00 dan Rp,00.

Koreksi Atas  
Reklasifikasi  
Rp,00

#### E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas reklasifikasi pada persediaan/aset tetap/aset lainnya. Saldo koreksi atas reklasifikasi pada (Balai Bahasa Provinsi Papua) per (30 Juni 2025) dan (30 Juni 2024) adalah sebesar Rp,00 dan Rp,00.

Selisih  
Revaluasi  
Aset Rp,00

#### E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan koreksi atas selisih penilaian kembali aset tetap dalam laporan keuangan. Selisih Revaluasi Aset Tetap per (30 Juni 2025) dan (30 Juni 2024) adalah sebesar Rp,00 dan Rp,00.

Koreksi Nilai  
Aset Non  
Revaluasi  
Rp,00

#### E.4.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan yang tidak berasal dari kegiatan revaluasi. Koreksi nilai aset non revaluasi per (30 Juni 2025) dan (30 Juni 2024) adalah sebesar Rp,00 dan Rp,00.

Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel E.9  
Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi

Kode	Uraian	30 Juni 2025
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-
391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	-
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>

Koreksi Lain-lain Rp,00

#### E.4.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain merupakan koreksi untuk menyesuaikan saldo anggaran maupun saldo ekuitas. Koreksi lain-lain per (30 Juni 2025) dan (30 Juni 2024) adalah sebesar Rp,00 dan Rp,00.

Transaksi Antar Entitas Rp,00

#### E.5 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas merupakan penjumlahan dari akun Diterima dari Entitas Lain, Ditagihkan ke Entitas Lain, Transfer Keluar dan Transfer Masuk serta Pengesahan Hibah Langsung. Nilai Transaksi Antar Entitas per (30 Juni 2025) dan (30 Juni 2024) sebesar Rp,00 dan sebesar Rp,00.

Adapun rincian transaksi antar entitas menurut akun per (30 Juni 2025) adalah sebagai berikut:

Tabel E.10  
Perbandingan Transaksi Antar Entitas Per Akun  
Per (30 Juni 2025) dan (30 Juni 2024)

*(dalam rupiah)*

No	Akun	Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik / (Turun)	%
1	313111	Ditagihkan Ke Entitas Lain	-	-	-	∞
2	313121	Diterima dari Entitas Lain	-	-	-	∞
3	313211	Transfer Keluar	-	-	-	∞
4	313221	Transfer Masuk	-	-	-	∞
5	391131	Pengesahan Hibah Langsung	-	-	-	∞
6	391133	Pengesahan Hibah Langsung TAYL	-	-	-	∞
<b>Jumlah</b>			-	-	-	∞

Ditagihkan Ke Entitas Lain Rp,00

#### E.5.1 Ditagihkan Ke Entitas Lain

Ditagihkan Ke Entitas Lain adalah merupakan pengeluaran belanja (Balai Bahasa Provinsi Papua) yang semuanya dibiayai oleh Bendahara Umum Negara (BUN) sebagai pengimbang Surplus/defisit Laporan Operasional.

Nilai Ditagihkan Ke Entitas Lain per (30 Juni 2025) dan (30 Juni 2024) sebesar Rp,00 dan sebesar Rp,00.

Diterima Dari  
Entitas Lain  
Rp,00

### E.5.2 Diterima Dari Entitas Lain

Diterima Dari Entitas Lain merupakan pendapatan satker yang disetor ke BUN sebagai pengimbang Surplus/defisit Laporan Operasional. Nilai Diterima Dari Entitas Lain per (30 Juni 2025) dan (30 Juni 2024) sebesar Rp,00 dan sebesar Rp,00.

Perbandingan antara realisasi pendapatan (neto) dengan saldo Diterima dari Entitas Lain sebesar Rp,00 dan Rp,00

Kelompok Pendapatan	Nilai Realisasi (Neto)	
PNBP Lainnya		Diterima dari Entitas Lain - LPE
Pendapatan BLU Lainnya		
<b>Total Selisih</b>		-
<b>Realisasi Belanja Neto - LRA</b>	-	

Transfer  
Keluar dan  
Transfer  
Masuk  
Rp,00 dan  
Rp,00

### E.5.3 Transfer Keluar dan Transfer Masuk

Transfer keluar dan transfer masuk merupakan transaksi yang dilakukan antar entitas akuntansi (satker) di dalam satu entitas pelaporan (Kementerian/Lembaga) atau antar Kementerian/Lembaga. Saldo Transfer Keluar dan Transfer Masuk per tanggal (*cut off*) dan (30 Juni 2024) masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp,00.

Pengesahan  
Hibah  
Langsung  
Rp,00

### E.5.4 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung adalah pengesahan atas pendapatan hibah langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung.

Saldo Pengesahan Hibah Langsung per (30 Juni 2025) dan (30 Juni 2024) masing-masing sebesar Rp,00 dan sebesar Rp,00.

Ekuitas Akhir  
Rp,00

### E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas per (30 Juni 2025) dan (30 Juni 2024) adalah masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp,00.

# **LAMPIRAN**

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI BAHASA PROVINSI PAPUA  
BALAI BAHASA PROVINSI PAPUA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024  
(DALAM RUPIAH)**

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2025			30 Juni 2024		
		ANGGARAN	REALISASI NETO	%	ANGGARAN	REALISASI NETO	%
<b>A. Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>B.1.</b>						
Penerimaan Negara Bukan Pajak		-	-	-	-	8,767,000	-
1. Pendapatan BLU	B.1.1	-	-	-	-	-	-
2. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.1.2	-	-	-	-	8,767,000	-
<b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah</b>		-	-	-	-	<b>8,767,000</b>	-
<b>B. Belanja Negara</b>	<b>B.2</b>						
<b>Belanja Pemerintah Pusat</b>		-	-	-	13,180,229,000	6,819,702,949	52
1. Belanja Pegawai	B.2.1	-	-	-	2,337,278,000	1,195,604,226	51
2. Belanja Barang	B.2.2	-	-	-	10,842,951,000	5,624,098,723	52
3. Belanja Modal	B.2.3	-	-	-	-	-	-
4. Belanja Sosial	B.2.4	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Negara</b>		-	-	-	<b>13,180,229,000</b>	<b>6,819,702,949</b>	<b>52</b>

**BALAI BAHASA PROVINSI PAPUA  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
NERACA**

PER (30 JUNI 2025) DAN 30 JUNI 2024  
(DALAM RUPIAH)

NAMA PERKIRAAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN/(PENURUNAN)	
		30 JUNI 2025	30 JUNI 2024	Jumlah	%
<b>ASET</b>					
<b>ASET LANCAR</b>	<b>C.1</b>				
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	-	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	-	-	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	-	-	-	-
Kas pada Badan Layanan Umum	C.1.4	-	-	-	-
Investasi Jangka Pendek - Badan Layanan Umum	C.1.5	-	-	-	-
Belanja Dibayar di Muka (prepaid)	C.1.6	-	-	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.1.7	-	-	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.1.8	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.9	-	-	-	-
Piutang Bukan Pajak (Neto)		-	-	-	-
Bag Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.10	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bag Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.11	-	-	-	-
Bag Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Neto)		-	-	-	-
Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	C.1.12	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.1.13	-	-	-	-
Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (Neto)		-	-	-	-
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	C.1.14	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	C.1.15	-	-	-	-
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum (Neto)		-	-	-	-
Persediaan	C.1.16	-	4,955,500	(4,955,500)	(100.00)
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		-	<b>4,955,500</b>	<b>(4,955,500)</b>	<b>(100.00)</b>
<b>ASET TETAP</b>	<b>C.2</b>				
Tanah	C.2.1	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	C.2.2	-	4,479,301,460	(4,479,301,460)	(100.00)
Gedung dan Bangunan	C.2.3	-	8,911,867,000	(8,911,867,000)	(100.00)
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.4	-	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	-	319,950,249	(319,950,249)	(100.00)
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2.6	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	-	-5,354,312,508	5,354,312,508	(100.00)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		-	<b>8,356,806,201</b>	<b>(8,356,806,201)</b>	<b>(100.00)</b>

<b>PROPERTI INVESTASI</b>	<b>C.3</b>				
Properti Investasi	C.3.1	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.3.2	-	-	-	-
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>	<b>C.4</b>				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.4.1	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.4.2	-	-	-	-
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Neto)		-	-	-	-
Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.4.3	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.4.4	-	-	-	-
Piutang Jangka Panjang Lainnya (Neto)		-	-	-	-
<b>JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG</b>		-	-	-	-
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>C.5</b>				
Aset Tak Berwujud	C.5.1	-	-	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.5.2	-	-	-	-
Aset Lain-lain	C.5.3	-	-	-	-
Aset Lain-lain BLU	C.5.4	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.5.5	-	-	-	-
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		-	-	-	-
<b>JUMLAH ASET</b>		-	<b>8,361,761,701</b>	<b>8,361,761,701</b>	<b>100.00</b>
<b>KEWAJIBAN</b>					
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>C.6</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	C.6.1	-	-	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.6.2	-	-	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.6.3	-	-	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.6.4	-	-	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.6.5	-	-	-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		-	-	-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		-	-	-	-
<b>EKUITAS</b>	<b>C.7</b>				
Ekuitas	C.7.1	-	8,361,761,701	(8,361,761,701)	(100.00)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		-	<b>8,361,761,701</b>	<b>(8,361,761,701)</b>	<b>(100.00)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		-	<b>8,361,761,701</b>	<b>(8,361,761,701)</b>	<b>(100.00)</b>

### III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI BAHASA PROVINSI PAPUA  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
LAPORAN OPERASIONAL PENUTUP  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024  
(DALAM RUPIAH)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2025	30 JUNI 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>					
<b>PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>					
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	-	-	-	-
Pendapatan Badan Layanan Umum	D.2	-	-	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	-	-	-
<b>BEBAN</b>					
Beban Pegawai	D.3	-	1,341,274,897	(1,341,274,897)	(100.00)
Beban Persediaan	D.4	-	19,085,600	(19,085,600)	(100.00)
Beban Barang dan Jasa	D.5	-	1,172,637,317	(1,172,637,317)	(100.00)
Beban Pemeliharaan	D.6	-	82,819,288	(82,819,288)	(100.00)
Beban Perjalanan Dinas	D.7	-	4,557,949,118	(4,557,949,118)	(100.00)
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	D.8	-	-	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.9	-	-	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	-	290,497,025	(290,497,025)	(100.00)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	-	-	-	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		-	<b>7,464,263,245</b>	<b>(7,464,263,245)</b>	<b>(100.00)</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		-	<b>(7,464,263,245)</b>	<b>7,464,263,245</b>	<b>(100.00)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>D.12</b>				
<b>Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar</b>		-	-	-	-
Pendapatan Pelepasan Aset	D.12.1	-	-	-	-
Beban Pelepasan Aset	D.12.2	-	-	-	-
<b>Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>		-	<b>8,767,000</b>	<b>(8,767,000)</b>	<b>(100.00)</b>
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.12.3	-	8,767,000	(8,767,000)	(100.00)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.12.4	-	-	-	-
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		-	<b>8,767,000</b>	<b>(8,767,000)</b>	<b>(100.00)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		-	<b>(7,455,496,245)</b>	<b>7,455,496,245</b>	<b>(100.00)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		-	<b>(7,455,496,245)</b>	<b>7,455,496,245</b>	<b>(100.00)</b>

BALAI BAHASA PROVINSI PAPUA  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PENUTUP**  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 dan 30 JUNI 2024  
(DALAM RUPIAH)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2025	30 JUNI 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>E.1</b>	8,361,761,701	8,713,507,403	<b>(351,745,702)</b>	<b>(4.04)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>	<b>E.2</b>	-	<b>(7,455,496,245)</b>	<b>7,455,496,245</b>	<b>(100.00)</b>
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS</b>	<b>E.3</b>	-	-	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	-	-	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	-	-	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.3	-	-	-	-
SELISIH REVALUASI ASET	E.3.4	-	-	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-	-	-
LAIN-LAIN	E.3.6	-	-	-	-
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>	<b>E.4</b>	-8,361,761,701	6,912,632,805	<b>(15,274,394,506)</b>	<b>(220.96)</b>
<b>KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS</b>		<b>(8,361,761,701)</b>	<b>(542,863,440)</b>	<b>(7,818,898,261)</b>	<b>1,440.31</b>
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>E.5</b>	-	<b>8,170,643,963</b>	<b>(8,170,643,963)</b>	<b>(100.00)</b>